

## Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin (PPMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Keluarga Miskin di Kabupaten Donggala

La Samudia Dalili<sup>1\*</sup>, Priyatna Prasetyawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

<sup>2</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Tadulako, Indonesia

Alamat: Jalan Rusdi Toana No.1, Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

Email Corresponding: [lasamudiadalili@gmail.com](mailto:lasamudiadalili@gmail.com)

**ABSTRACT.** *This study aims to analyze: 1) the implementation of the Poor Family Community Empowerment Program in Donggala Regency; and 2) factors that affect the Implementation of the Poor Family Community Empowerment Assistance Program in Donggala Regency. This study uses a qualitative type of research. The population in this study is 10,748 people from poor families in Biromaru, Marawola and Tanantovea Districts who received PPMKM assistance according to 2005 data. The determination of the sample in this study uses purposive sampling where 94 people are used as samples in this study. The data analysis used is a qualitative analysis using a frequency table. The results of the study show that program communication, program implementation resources, program implementation disposition and program implementation bureaucratic structure are very decisive for the implementation of the Poor Family Community Empowerment Assistance Program in improving the welfare of poor families. Meanwhile, the dominant factor influencing the Poor Family Community Empowerment program is the role of the local government as a policy maker so that in general in this study it is stated that the implementation of policies has a significant effect on the implementation of PPMKM in improving the welfare of poor families in Donggala Regency.*

**Keywords:** *Poor Family Community Empowerment Assistance Program, Poor Family Community Welfare, Program Implementation*

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin di Kabupaten Donggala; dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin di Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk masyarakat keluarga miskin Kecamatan Biromaru, Marawola dan Tanantovea yang memperoleh bantuan PPMKM menurut data tahun 2005 sebanyak 10.748 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana 94 orang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi program, sumber daya pelaksana program, disposisi pelaksana program dan struktur birokrasi pelaksana program sangat menentukan bagi pelaksanaan Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat keluarga miskin. Sedangkan faktor yang dominan berpengaruh dalam program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin adalah peran pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan sehingga secara umum dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Implementasi kebijakan berpengaruh signifikan bagi pelaksanaan PPMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat keluarga miskin di Kabupaten Donggala.

**Kata Kunci :** Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin, Kesejahteraan Masyarakat Keluarga Miskin, Implementasi Program

### 1. LATAR BELAKANG

Dampak dari krisis ekonomi sejak tahun 1997 telah memberi implikasi terhadap menurunnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari kecenderungan semakin meningkatnya masyarakat miskin. Perbincangan tentang kemiskinan dan upaya pemberantasannya pun belakangan makin marak. Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia, karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan

mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat (Purwanto, 2007). Oleh sebab itu, kajian untuk mengatasi kemiskinan harus dengan menyusuri dimensi-dimensi kemiskinan melalui pendekatan politik. Kemiskinan telah mengakibatkan solidaritas manusia untuk melihatnya sebagai masalah umat manusia sekaligus masalah bangsa.

Kemiskinan itu sendiri merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dilanda serba kekurangan terutama dalam hal-hal pemenuhan kebutuhannya seperti makanan, pakaian, air, tempat berlindung atau tempat tinggal serta dalam hal Pendidikan dan pekerjaan pun belum bisa dipenuhi untuk menunjang hidup mereka. (Orlando Padoma, 2023). Fenomena kemiskinan bukan hanya terbatas pada kurangnya keuangan, melainkan kurangnya kreativitas, kurangnya motivasi, kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan berbagai potensi dan sumber daya yang ada serta secara khusus bahwa persoalan ini telah melingkar diantaranya lemahnya mengembangkan potensi diri dan tertutupnya potensi diri untuk berkembang di Masyarakat (Abdullah, 2008). Dalam prospektif penanggulangan kemiskinan terkini, pendekatan baru harus mulai dirintis, dimana orang-orang miskin dipahami oleh aktor-aktor pembangunan dan bukan sebagai obyek pembangunan yang disejahterakan. Kebijakan program pemberdayaan masyarakat miskin menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin dengan menerapkan prinsip-prinsip keberpihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipasi, desentralisasi, dan kompetisi sehat. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan desa, sehingga masyarakat desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan perannya untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam seluruh proses pembangunan.

Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah Dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat (Sutoro, 2015). Berbagai strategi dan upaya terus dilakukan pemerintah untuk segera mengurangi kesenjangan dan membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan terutama penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Namun demikian, berbagai program dan strategi yang dilakukan untuk segera mengurangi kesenjangan dan membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, banyak yang dianggap gagal, tidak produktif dan tidak efektif, sebagaimana yang dialami bangsa Indonesia.

Realitas kemiskinan di Kabupaten Donggala mengindikasikan bahwa hampir memasuki seluruh domain faktor-faktor penyebab kemiskinan, baik domain ekonomi, sosial

maupun politik. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan harus dengan pendekatan melalui tiga dimensi tersebut. Karena begitu luas cakupan dimensi kemiskinan, maka sulit untuk membuat suatu program anti kemiskinan sering mengambil dimensi tertentu agar lebih valid dan akurat. Dengan demikian, program bantuan pemberdayaan masyarakat keluarga miskin, untuk memerangi kemiskinan yang ditimbulkan oleh kelangkaan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Sasaran yang ingin dicapai adalah pemberdayaan masyarakat miskin, dalam upaya peningkatan kesejahteraan, dan membangun sarana desa pendukung kegiatan sosial ekonomi serta peningkatan fungsi dan peran kelembagaan yang ada di desa. Berhasil atau tidak kemampuan pemberdayaan yang ditawarkan oleh program pemberdayaan masyarakat keluarga miskin desa, sangat tergantung pada implementasi program di daerah, sementara persoalan implementasi, sangat ditentukan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi. Berbagai program yang ditempuh melalui instrumen perkreditan seperti melalui Kredit Investasi Kecil, Kredit Modal Kerja Permanen, Sedangkan kebijaksanaan anggaran melalui berbagai Program Inpres yakni : Inpres Kabupaten, Inpres Sekolah Dasar, Inpres Kesehatan Masyarakat, Inpres Provinsi, Inpres Pasar, Inpres Penghijauan dan Inpres Desa Tertinggal, serta Program Inpres Bantuan Pembangunan Desa. Dari hasil pendataan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Donggala tahun 2004 bahwa keluarga Miskin di Kabupaten Donggala berjumlah 44.035 keluarga terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 12.783 dan KS 1 sebanyak 31.252, bila dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Donggala berjumlah 111.001, maka berarti ada sekitar 39,76% dari seluruh keluarga berada di bawah garis kemiskinan. Menyadari kondisi seperti ini, dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Donggala sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, tentang pemerintahan Daerah. menetapkan satu kebijakan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin (PPMKM) yang disahkan dalam DIP-DPO ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/0191/B. BIPRAM/2003, yang pelaksanaan mulai tahun 2003. Selanjutnya Pemda Donggala menetapkan Pedoman Pelaksanaan PPMKM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/111.1038/Bag.Umum/2003. Sehingga dalam tahun anggaran 2003 dialokasikan dana melalui Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Donggala sebesar Rp. 1.700.000.000 untuk kegiatan Lantainisasi dan Pemberdayaan masyarakat miskin masing-masing desa diberikan bantuan sebesar Rp. 50.000.000. Dengan direvisinya Undang-undang No.22 tahun 1999 menjadi Undang-

undang No. 32 tahun 2004, maka Visi dan Misi serta Prioritas Program di Kabupaten Donggala 2004-2009 program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin diarahkan untuk mencapai tujuan umum yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin. Dari tujuan tersebut di atas, diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan desa terutama yang mengarah kepada usaha pendapatan keluarga dalam meningkatkan ekonomi keluarga untuk lebih meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat keluarga miskin. Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin adalah salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat keluarga miskin melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan untuk mengangkat harkat dan martabat kelompok ekonomi produktif yang tidak mampu agar bisa terlepas dari masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan, memampukan dan berusaha memandirikan masyarakat.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan analisa kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Iskandar, 2009). Dengan kata lain bahwa dalam penelitian kualitatif lebih menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Karena hanya manusia sebagai alat saja yang mampu memahami kaitan terhadap berbagai kenyataan di lapangan. Sedangkan untuk taraf penjelasannya, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang lebih mendalam dan peneliti ikut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin (PPMKM) dan mencoba untuk menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian berdasarkan suatu obyek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Analisis data yang dilakukan yakni mengklasifikasi, Menyusun, mengolah, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan penelitian (Fiantika, 2022). Teknik Analisis data menggunakan tiga tahapan yakni pertama data yang direduksi yaitu seluruh data yang didapatkan di lapangan. Kedua penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Ketiga verifikasi atau penyimpulan adalah proses penampilan inti dari data, dari penyajian data yang akurat dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat, padat namun jelas.



### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pembuat kebijakan diperlukan keterlibatannya dalam implementasi kebijakan agar dapat memberikan pengaruh, melayani dan membimbing perilaku dari kelompok Masyarakat yang disebut dengan target group (Aprilia, 2020). Target group yang dimaksud adalah Masyarakat keluarga miskin. Di dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Miskin ada beberapa faktor yang dominan berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Keluarga Miskin diantaranya adalah komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin (PPMKM), karena program ini dirancang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha ekonomi produktif, meliputi bantuan dana bergulir dan bantuan lantainisasi bagi keluarga yang lantai rumahnya belum disemen (lantai tanah). Program ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan program kemiskinan lainnya, pendekatan yang digunakan dalam PPMKM adalah pemberdayaan masyarakat, dengan cara yakni masyarakat penerima bantuan dalam wadah kelompok diberikan kebebasan dalam menentukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah kelompok masyarakat bersama-sama dengan tokoh formal maupun non formal. Salah satu wujud kepedulian yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Donggala adalah membantu untuk memberdayakan masyarakat melalui PPMKM guna menanggulangi masyarakat keluarga miskin yang ada di pedesaan atau kelurahan melalui bantuan modal usaha guna menunjang ekonomi keluarga miskin dan pembangunan lantainisasi bagi keluarga-keluarga yang rumahnya masih berlantaikan tanah, sekaligus merupakan suatu proses pembelajaran atau rangsangan (stimulus) terhadap masyarakat dan aparat di desa melalui kegiatan pengambilan keputusan yang sifatnya demokratis, baik dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum bantuan diberikan kepada masyarakat baik itu dalam bentuk dana maupun barang (Semen), maka pada tahap awal Tim Koordinasi tingkat Kabupaten Donggala turun langsung di lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dan pengelola PPMKM yang ada di desa maupun pada tingkat Kecamatan dapat memahami dan mengerti mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin (PPMKM), sehingga sasaran program bantuan

ini benar-benar hanya tertuju kepada keluarga miskin. Tingkat transparansi pelaksanaan PPMKM sangat baik karena Tim Koordinasi tingkat Kabupaten, Tim Pelaksana di tingkat Kecamatan dan Tim Operasional desa sampai kepada fasilitator desa dan konsultan Manajemen secara bersama-sama mensosialisasikan secara aktif mekanisme dan alur kegiatan PPMKM mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai kepada pembinaan terhadap kelompok serta penanganan bermasalah dilakukan secara terbuka. Dalam pemberian bantuan dana bergulir kepada pemanfaat disampaikan secara terbuka besaran dana yang akan dicairkan berdasarkan jenis usahanya.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, juga para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak bisa efektif. bahwa sumberdaya pelaksana PPMKM mampu mengelola program bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan baik karena pengelolaan program dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan dimana rata-rata Tim pelaksana di tingkat Kecamatan dan desa telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada hubungannya dengan pengelolaan program, disamping itu dalam pelaksanaannya telah dibentuk organisasi pengelola dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat desa. Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu ada kerja sama yang baik dari berbagai pihak, sebab bila ada perpecahan dalam organisasi dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk implementasi kebijakan yang kompleks dan dapat memboroskan sumber-sumber yang terbatas, adanya perubahan yang tidak diinginkan, menciptakan kegaduhan, kebingungan yang kesemuanya itu akan mengarah kepada implementasi kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula.

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kekuasaan/tugas, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan organisasi luar dan sebagainya. Tanggapan responden menyatakan bahwa Struktur organisasi pelaksanaan PPMKM dianggap baik karena telah dibentuk organisasi pengelola program terdiri dari : Bupati sebagai Penanggung jawab Program, dibantu oleh Tim Koordinasi PPMKM, Konsultan Manajemen, Tim Pelaksana Kecamatan dan Tim Operasional Desa serta fasilitator sebagai tenaga pendamping penerima manfaat.

## **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin di Kabupaten Donggala**

Adapun faktor-faktor yang dominan mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin adalah :

- a. Peran pemerintah daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pembangun di daerah terutama peningkatan terhadap taraf hidup masyarakat miskin

Perlu adanya Koordinasi secara terpadu dan konsisten antara lintas sektoral sehingga mampu mempengaruhi pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala melalui PPMKM agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

- b. Pembiayaan dan Sarana

Dana dan sarana sangat berpengaruh penting dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat Keluarga Miskin apakah itu sumbernya dari APBN, APBD maupun dari pihak swasta.

- c. Data Keluarga Miskin

Data sangat berpengaruh penting untuk menetapkan sasaran kegiatan. Adapun yang perlu diperhatikan adalah bahwa data keluarga miskin harus betul-betul lengkap dan falit berkualitas.

- d. Peran Tim Pengelola dalam menjalankan tugasnya yakni mengadakan pembinaan dan pendampingan dilapangan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan PPMKM.

- e. Peran Serta Masyarakat

Pembangunan adalah sebuah perjalanan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam artian bahwa pembangunan adalah suatu yang dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peran masyarakat sebagai kekuatan pembaharuan untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial yang mendasar maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tetapi terkendali dalam ruang lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

## **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Keluarga Miskin**

Upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas keluarga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat keluarga miskin ditujukan untuk membangun kemandirian melalui pemberdayaan keluarga sebagai landasan pembangunan keluarga. Dengan harapan agar keluarga-keluarga yang menjadi prioritas sasaran sehingga menjadi keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup secara harmonis dan



mempunyai kemampuan fisik material dan maupun psikis mental spritual, sehingga mereka mampu hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya menuju keluarga sejahtera.

Ada 2 dua hal pokok implementasi kebijakan yang paling dominan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga miskin antara lain:

a. Peningkatan kualitas hidup keluarga

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan produktifitasnya agar menjadi sumberdaya manusia yang bermanfaat bagi pembangunan. Melalui kebijakan ini diharapkan keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan dirinya dan keluarganya untuk hidup secara harmonis. Peningkatan kualitas keluarga dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin dilakukan melalui berbagai pembinaan sesuai dengan masalah dan tantangan yang dihadapi pada masing-masing tahapan dari siklus kehidupan keluarga untuk mencapai peningkatan kesejahteraan keluarga.

b. Peningkatan kemandirian keluarga

Peningkatan kemandirian keluarga dalam Program Pemberda-yaan Keluarga Miskin diarahkan agar keluarga mempunyai kemampuan, baik kemampuan fisik materil maupun psisik mental spritual, sehingga mereka (keluarga miskin) mampu hidup mandiri dalam mengembangkan diri dan keluarganya untuk menuju peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga dengan demikian diharapkan keluarga-keluarga semakin berdaya untuk mengentaskan diri dan keluarganya dari keterbelakangan ekonomi secara mandiri dan lestari.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin sudah sesuai pedoman dan mekanisme pelaksanaan serta tepat sasaran dimana bantuannya langsung diterima oleh keluarga-keluarga yang tidak mampu (masyarakat ekonomi lemah) yang memiliki usaha ekonomi produktif. Demikian pula tingkat transparansi, motivasi dan respon serta tingkat akuntabilitas dan struktur organisasi pelaksanaan program serta rapat koordinasi internal terhadap Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin sudah maksimal.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin di Kabupaten Donggala adalah masih ada sebahagian masyarakat beranggapan bahwa bantuan dana bergulir yang diberikan kepada mereka

merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan untuk digulirkan kembali kepada keluarga miskin lainnya sehingga sangat berpengaruh kepada tingkat pengembalian. Disamping itu, faktor-faktor dominan berpengaruh terhadap pelaksanaan PPMKM yaitu peran Pemerintah daerah, dana, data, dan pengelola program baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun desa.

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah untuk lebih terarahnya pelaksanaan PPMKM di Kabupaten Donggala perlu adanya koordinasi antar lintas sektor yang terkait sehingga penanganan pengentasan kemiskinan akan lebih baik. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin harus disosialisasikan lebih aktif lagi kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan sehingga pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prinsip-prinsip pelaksanaan PPMKM akan lebih meningkat. Peran pengelola program di tingkat desa harus mampu menginventarisir/ mendata secara ril seluruh masyarakat miskin, sehingga dalam penyaluran bantuan PPMKM nampak bahwa masyarakat yang akan menerima bantuan benar-benar adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah. (2008). *Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama*. Makassar: Universitas Hasanudin
- Aprilia, R. W. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 75-83.
- Fiantika, F.R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada
- Orlando Padoma, Y. A. (2023). Analisis Bibliometrik Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017-2022. *Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang*, 123-130.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 295-324.
- Sutoro E, dkk. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)